

- Tanggal Upload program kinerja Target Kinerja Mulai Tanggal 28-06-2020 Sampai dengan 05-07-2022
- Tanggal Upload program kinerja Target Kinerja Mulai Tanggal 28-06-2021 Sampai dengan 05-07-2021
- Tanggal Upload program kinerja Target Kinerja Mulai Tanggal 01-06-2022 Sampai dengan 05-07-2022

## MATRIK MONITORING KINERJA versi FORMAT 8 KOLOM (F8K)

### Monitoring Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
							M	K	H	
1	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		periode T22-B01 Pembentukan SK TIM	100			SK TIM.pdf
						periode T22-B01			REVISI SK TIM.pdf	
						periode T22-B02 Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	100			B02.Laporan Kegiatan hasil koordinasi.pdf
						periode T22-B02				Data dukung laporan kegiatan hasil koordinasi.pdf
						periode T22-B03	100			B03.1.Laporan Kegiatan Koordinasi.pdf
						periode T22-B03				B03.2.data dukung laporan kegiatan dan koordinasi (UANG).pdf
						periode T22-B03	100			Revisi.B03.1.Laporan Kegiatan Koordinasi.pdf
						periode T22-B04 Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah				B04.1.Laporan Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh perancang.pdf
						periode T22-B04	100			B04.2.Surat Telah Selesai Harmonisasi.pdf
						periode T22-B04				B04.3.matrik data pengharmonisasian.pdf
						periode T22-B04	100			Dakung laporan Kegiatan_1.pdf
						periode T22-B04				Dakung laporan Kegiatan_2.pdf
						periode T22-B04	100			Dakung laporan Kegiatan_3.pdf
						periode T22-B04				B06.4.data dukung kegiatan harmonisasi.pdf
						periode T22-B05	100			B05.1.Laporan Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.pdf
						periode T22-B05				B05.2.Dakung Undangan absensi notula dan dokumentasi.pdf
						periode T22-B05	100			B05.3.Dakung Undangan Absensi Notula dan Dokumentasi.pdf
						periode T22-B05				B05.4.kegiatan harmonisasi (Matrik).pdf
						periode T22-B06 Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah	100			B06.1.Laporan Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.pdf
						periode T22-B06				B06.Dakung Kegiatan Analisa dan Evaluasi Peraturan Daerah.pdf
						periode T22-B06	100			B06.Dakung Naskah Akademik.pdf
						periode T22-B06				B06.dakung Kegiatan sosialisasi prolegda.pdf
						periode T22-B06	100			B06.1.Data dukung kegiatan harmonisasi.pdf
						periode T22-B06				B06.2.Data dukung kegiatan harmonisasi.pdf
						periode T22-B06	100			B06.3.Data dukung kegiatan harmonisasi.pdf
						periode T22-B06				B06.4.data dukung kegiatan harmonisasi.pdf
						periode T22-B06	100			B06.5.Data dukung kegiatan harmonisasi.pdf
						periode T22-B07 Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah				
						periode T22-B08				
						periode T22-B09 Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah				

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T22-B10					
						periode T22-B11					
						periode T22-B12 Penyusunan dan Penyampaian laporan kegiatan Fasilitasi Raperda oleh Kantor Wilayah					
2	40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia		40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia		periode T22-B01 Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	100				B01 Dokumentasi dan notula koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah.pdf
						periode T22-B02 1. Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2021 Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait					B02 Laporan evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM 2021.pdf
						periode T22-B03 Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	100				Tarja B03 Bidang HAM Dokumentasi dan Notula Koordinasi dan Konsultasi Capaian Aksi HAM Daerah.pdf
						periode T22-B04 Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04					TARJA B04 BIDANG HAM Surat Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi Kabupaten Kota.pdf
						periode T22-B05 Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B04	100				Tarja B05 Aksi HAM.pdf
						periode T22-B05					Revisi Tarja B05 Aksi HAM.pdf
						periode T22-B06 Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08	100				Tarja B06 Aksi HAM.pdf
						periode T22-B07 Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota					
						periode T22-B08 Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08					
						periode T22-B09 Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B08					
						periode T22-B10 Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota					
						periode T22-B11 Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B12					
						periode T22-B12 Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12					
3	70% Desa/Kelurahan sadar hukum		70% Desa/Kelurahan sadar hukum	70% Desa/Kelurahan sadar hukum		periode T22-B02 pengecekan kesesuaian data DSH yang disampaikan oleh BPHN dengan Data yang ada di Wilayah	100				1. Surat BPHN.pdf
						periode T22-B02					2. Matrik data hasil pengecekan DSH.pdf
						periode T22-B02	100				202201241142384132_lampiran.xlsx
						periode T22-B03 evaluasi DSH secara administratif (apakah desa masih ada atau tidak atau masih tercatat pada administratif pemerintahan) Tahap I					MATRIKS DATA DSH ADMINISTRATIF.xls
						periode T22-B03	100				Laporan Tarja B03 Desa, Kelurahan Sadar Hukum.pdf
						periode T22-B04					Laporan Tarja B04.pdf
						periode T22-B04	100				MATRIKS DATA DSH ADMINISTRATIF B04.xls
						periode T22-B06 Penyusunan laporan hasil evaluasi DSH berdasarkan syarat administratif					Laporan Tarja B06 (Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat).pdf
						periode T22-B06	100				Revisi B06 Laporan dan Matriks Data DSH.pdf
						periode T22-B07 Melakukan pembentukan dan pembinaan Kelompok KADARKUM di masing-masing wilayah					
						periode T22-B08 Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum dalam Dimensi Akses Informasi Hukum dan Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/Kepala Desa					
						periode T22-B09 Melakukan pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan binaan di masing-masing wilayah					
						periode T22-B10					
						periode T22-B11 implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan dan Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi dan Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan sadar hukum					
						periode T22-B12 Menyusun Laporan capaian target pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di masing-masing wilayah dan rencana usulan target pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tahun selanjutnya					

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian			Status Capaian	Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
							M	K	H		
4	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah		Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah		periode T22-B01 1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi 2. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas	100				B01 IPKIKM.pdf
						periode T22-B02 1. Penyusunan Proposal Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas 2. Persetujuan Proposal Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah 3. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Februari					B02 IPKIKM.pdf
						periode T22-B03 1. Presentasi Proposal Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi hasil survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi 3. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Maret	100				B03 IPK IKM POIN A.pdf
						periode T22-B03					B03 IPK IKM POIN B.pdf
						periode T22-B03	100				B03 IPK IKM POIN C.pdf
						periode T22-B03					REVISI B03 IPK IKM POIN B.pdf
						periode T22-B04 1. Analisis data hasil survei online 3AS Triwulan I (Januari-Maret) 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi hasil survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi (lanjutan) 3. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April	100				B04 IPK IKM Poin 1.pdf
						periode T22-B04					B04 IPK IKM POIN 2.pdf
						periode T22-B04	100				B04 IPK IKM POIN 3.pdf
						periode T22-B05 1. Pengolahan dan Analisa data hasil verifikasi lapangan evaluasi hasil survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi 2. Penyusunan Draf Laporan Akhir Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas 3. Presentasi Draf Laporan Akhir Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas 4. Penyempurnaan Laporan Akhir Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas 5. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Mei	84				B05 IPK IKM POIN A.pdf
						periode T22-B05					B05 IPK IKM POIN B.pdf
						periode T22-B05	84				B05 IPK IKM POIN C.pdf
						periode T22-B05					B05 IPK IKM POIN D.pdf
						periode T22-B05	84				B05 IPK IKM POIN E.pdf
						periode T22-B06 1. Penyampaian Laporan Akhir Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah serta Kepala UPT terkait. 2. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juni	100				Revisi B06 IPK IKM POIN B.pdf
						periode T22-B06					Revisi B06 IPK IKM POIN A.pdf
						periode T22-B07 1. Analisis data hasil survei online 3AS Triwulan II (April-Juni) 2. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli					
						periode T22-B08 Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Agustus					
						periode T22-B09 1. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan September 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi					
						periode T22-B10 1. Analisis data hasil survey online 3AS Triwulan III (Juli-September) 2. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober					

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	%	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T22-B11 Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan November					
						periode T22-B12  1. Analisis data hasil survey online 3AS Triwulan IV (Oktober-November) 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi					
5	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah		Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah		periode T22-B01  1. Pembentukan SK Tim Analisis Kebijakan 2. Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan Hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM	100				B01 SIPKUMHAM.pdf
						periode T22-B02  1. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan 3. Penyusunan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi					B02 SIPKUMHAM.pdf
						periode T22-B03  1. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan dengan melibatkan stakeholders 2. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 4. Penyampaian Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala Kantor Wilayah	100				B03 SIPKUMHAM POIN A.pdf
						periode T22-B03					B03 SIPKUMHAM POIN B.pdf
						periode T22-B03	100				B03 SIPKUMHAM POIN C.pdf
						periode T22-B03					B03 SIPKUMHAM POIN D.pdf
						periode T22-B04 Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan Hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM	100				B04 SIPKUMHAM.pdf
						periode T22-B05  1. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan 3. Penyusunan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi					B05 SIPKUMHAM POIN 1.pdf
						periode T22-B05	100				B05 SIPKUMHAM POIN 2.pdf
						periode T22-B05					B05 SIPKUMHAM POIN 3.pdf
						periode T22-B06  1. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan dengan melibatkan stakeholders 2. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 4. Penyampaian Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala Kantor Wilayah	100				B06 SIPKUMHAM POIN 2.pdf
						periode T22-B06					B06 SIPKUMHAM POIN 3.pdf
						periode T22-B06	100				B06 SIPKUMHAM POIN 4.pdf
						periode T22-B06					B06 SIPKUMHAM POIN 1.pdf
						periode T22-B07 Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan Hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM					
						periode T22-B08  1. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan 3. Penyusunan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi					
						periode T22-B09  1. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan dengan melibatkan stakeholders 2. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 4. Penyampaian Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala Kantor Wilayah					
						periode T22-B10  1. Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan Hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM 2. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan					

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian			Status Capaian	Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
							M	K	H		
						periode T22-B11 1. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan 2. Penyusunan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan dengan melibatkan stakeholders 4. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi					
						periode T22-B12 1. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 2. Penyampaian Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala Kantor Wilayah 3. Rencana tindak lanjut rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM					
6	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM		Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM		periode T22-B01 Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah	100				B01 Surat Notifikasi Pelaksanaan Permenkumham KKP HAM.pdf
						periode T22-B02 Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM					B02 Dokumentasi dan notulensi rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM.pdf
						periode T22-B03 Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah	100				Tarja B03 Bidang HAM Dokumen Formulir Pengisian Pelaporan KKP HAM.pdf
						periode T22-B04 Mengunggah dokumen pelaporan KKP HAM Pemda masing-masing Wilayah ke website Aplikasi (kkpham.kemenkumham.go.id)					TARJA B04 Bidang HAM Berita Acara Pengisian ke Aplikasi KKPHAM.pdf
						periode T22-B05 Menginventarisir hasil pelaporan KKP HAM	100				Tarja B05 KKP HAM.pdf
						periode T22-B06 Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM					Tarja B06 Kabupaten Kota Peduli HAM.pdf
						periode T22-B07 Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka evaluasi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM					
						periode T22-B08					
						periode T22-B09 Penginputan data indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM					
						periode T22-B10 Mengevaluasi Berita Acara Hasil Pemeriksaan					
						periode T22-B11 Koordinasi hasil penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM					
						periode T22-B12 Penyusunan Laporan Evaluasi KKP HAM					
7	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM		Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM		periode T22-B01 Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	100				B01 Laporan Evaluasi Dugaan Pelanggaran HAM.pdf
						periode T22-B02 Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya					B02 Surat koordinasi atau klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran HAM.pdf
						periode T22-B03	100				Tarja B03 Bidang HAM Surat Koordinasi atau Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.pdf
						periode T22-B04 Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I					TARJA B04 BIDANG HAM Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran permasalahan HAM.pdf
						periode T22-B04	100				Revisi TARJA B04 BIDANG HAM Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran permasalahan HAM.pdf
						periode T22-B05 Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I					Tarja B05 Tindak Lanjut penanganan Dugaan Pelanggaran, Permasalahan HAM pada Triwulan I.pdf
						periode T22-B06	100				Tarja B06 Surat Koordinasi klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran permasalahan HAM.pdf
						periode T22-B07 Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I					
						periode T22-B08 Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I					
						periode T22-B09 Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I					

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T22-B10 Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Januari-September					
						periode T22-B11 Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III					
						periode T22-B12 1. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III; 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada tahun berjalan					
8	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah		Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah		periode T22-B01 Pembentukan SK TIM	100				B01 SK Penunjukan Tim PMPJ dan Desiminasi.pdf
						periode T22-B02 Koordinasi awal untuk pemetaan pengawasan terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah					B02 Laporan koordinasi awal PMPJ.pdf
						periode T22-B02	100				Revisi B02 Laporan koordinasi awal PMPJ.pdf
						periode T22-B02					Revisi2 B02 Laporan koordinasi awal PMPJ sumaker.pdf
						periode T22-B03 Sosialisasi pemahaman audit kepatuhan secara teknis kepada Tim Audit Pengawas Kepatuhan yang telah dibentuk	100				Laporan Sosialisasi PMPJ.pdf
						periode T22-B03					revisi tambahan laporan sosialisasi PMPJ sumaker.pdf
						periode T22-B04 Pengawasan penerapan PMPJ oleh Tm Audit Pengawas Kepatuhan kepada Notaris di Wilayah Periode I (April hingga Juni 2022)	100				Surat keterangan terkait Pengawasan PMPJ.pdf
						periode T22-B05					Surat keterangan terkait Pengawasan PMPJ Mei.pdf
						periode T22-B06	100				B06 Laporan kegiatan koordinasi terkait Pelaksanaan pelaporan Pelantikan PPNS.pdf
						periode T22-B06					B06 - Pengawasan PMPJ.pdf
						periode T22-B06	100				Surat keterangan terkait Pengawasan PMPJ Juni.pdf
						periode T22-B06					Pemetaan Data Notaris (PMPJ) 2022.pdf
						periode T22-B06	100				8. Banten.pdf
						periode T22-B07 Pengawasan penerapan PMPJ oleh Tim Audit Pengawas Kepatuhan kepada Notaris di Wilayah Periode II (Juli hingga September 2022)					
						periode T22-B08					
						periode T22-B09					
						periode T22-B10 Evaluasi atas Audit Pengawas Kepatuhan Penerapan PMPJ oleh Kanwil bersama Majelis Pengawas Notaris: • Kantor Wilayah wajib melaksanakan rapat internal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, di mana evaluasi sekurang-kurangnya meliputi: o Capaian dari pelaksanaan pengawasan; o Tantangan / kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta solusi yang diambil; o Rencana tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan tahun 2023.					
9	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)		Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)		periode T22-B01 Pembentukan SK TIM	100				B01 SK Tim.pdf
						periode T22-B02 Persiapan dan koordinasi awal Diseminasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)					B02 Diseminasi_Laporan persiapan dan koordinasi awal.pdf
						periode T22-B02	100				Revisi B02 Diseminasi_Laporan persiapan dan koordinasi awal.pdf
						periode T22-B03					B03 Desiminasi AHU.pdf
						periode T22-B03	100				Revisi B03 Desiminasi AHU.pdf
						periode T22-B04 Diseminasi layanan Perseroan Perorangan					diseminasi B04 2022 (1).pdf
						periode T22-B05	100				DISEMINASI PP B05.pdf
						periode T22-B06 Diseminasi layanan Kewarganegaraan &Pewarganegaraan					B06 Laporan pelaksanaan diseminasi layanan Perseroan Perorangan.pdf

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian			Status Capaian	Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
							M	K	H		
						periode T22-B07 Diseminasi layanan Kewarganegaraan & Pewanegaraan					
						periode T22-B08 Diseminasi layanan Partai Politik					
						periode T22-B09 Diseminasi layanan Partai Politik					
						periode T22-B10 Diseminasi layanan Apostille					
						periode T22-B11					
						periode T22-B12 Evaluasi pelaksanaan diseminasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewanegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)					
10	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham		Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham		periode T22-B06 Koordinasi terkait Pelaksanaan pelaporan Pelantikan PPNS di wilayah melalui Aplikasi PPNS	100				B06 Laporan kegiatan koordinasi terkait Pelaksanaan pelaporan Pelantikan PPNS.pdf
						periode T22-B07 Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS					
						periode T22-B08					
						periode T22-B09					
						periode T22-B10					
						periode T22-B11					
						periode T22-B12 Evaluasi Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS					
11	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stake		Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah		periode T22-B02 Penyusunan evaluasi MoU/PKS 2021 dan rencana kerja implementasi MoU/PKS Kanwil dengan Mitra/Stakeholder tahun 2022	100				08.B02.Laporan evaluasi MOU_PKS 2022.pdf
						periode T22-B03 Persiapan pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi/Webinar dll terkait dengan Tahun Cipta dan POP HC dikaitkan dengan tema IP Youth kepada stakeholder (akademisi, mahasiswa, siswa/siswi sekolah, penggiat seni, dll)					08.B03.Laporan pelaksanaan Sosialisasi Hak Cipta (MOUPKS).pdf
						periode T22-B04 Melaksanakan kegiatan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi kepada stakeholder (akademisi, mahasiswa, siswa/siswi sekolah, penggiat seni, dll) terkait dengan Hak Cipta dikaitkan dengan tema IP Youth	100				08.B04.Laporan kegiatan terkait dengan Hak Cipta dikaitkan dengan tema IP Youth (1).pdf
						periode T22-B05 Persiapan pelaksanaan Implementasi MoU/PKS atau penandatanganan MoU/PKS baru semester I					08.B05.Laporan Persiapan pelaksanaan Implementasi MoU.pdf
						periode T22-B06 Implementasi kerjasama dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah	100				08.B06.Laporan Persiapan pelaksanaan Implementasi MoU.pdf
						periode T22-B07 Persiapan pelaksanaan Implementasi MoU/PKS atau penandatanganan MoU/PKS baru semester II					
						periode T22-B08 pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi/Webinar dll terkait dengan Tahun Cipta dan POP HC dikaitkan dengan tema IP Youth kepada stakeholder (akademisi, mahasiswa, siswa/siswi sekolah, penggiat seni, dll)					
						periode T22-B09 Implementasi kerjasama dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah					
						periode T22-B11 Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan implementasi moU/PKS atau penyusunan MoU/PKS baru 2021					
						periode T22-B12 Penyusunan rencana implementasi MoU/PKS untuk meningkatkan permohonan KI tahun 2023					
12	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait		Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait		periode T22-B01 Penyusunan rencana kerja sama mendorong permohonan IG tahun 2022	100				B02.10.Laporan IP Clinic (1).pdf
						periode T22-B01					B01.09.Laporan Penyusunan Rencana Kerja Sama IG (1).pdf

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T22-B01	100				Revisi.09.B01.Laporan Penyusunan Rencana Kerja Sama IG.pdf
						periode T22-B02 Koordinasi dengan mitra/stakeholder (MPIG/Pemda) terkait rencana penyusunan permohonan Indikasi Geografis					09.B02.Laporan Koordinasi Penyusunan IG.pdf
						periode T22-B02	100				Revisi.09.B02.Laporan Koordinasi Penyusunan IG.pdf
						periode T22-B03 Koordinasi dengan Subdit IG DJKI terkait rencana pengajuan IG di wilayah (dapat melalui daring)					09.B03.Laporan Koordinasi dengan Subdit IG.pdf
						periode T22-B04 Sosialisasi dan Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (permohonan IG)	100				09.B04.Sosialisasi dan Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG.pdf
						periode T22-B06 Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (permohonan IG)					09.B06.Koordinasi Penyusunan IG.pdf
						periode T22-B07 - Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (permohonan IG); - Koordinasi dengan Subdit IG/ Tim ahli IG terkait progres kelengkapan pengajuan permohonan					
						periode T22-B09 Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (kelengkapan permohonan IG)					
						periode T22-B10 Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (kelengkapan permohonan IG)					
						periode T22-B11 - Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (kelengkapan permohonan IG); - Koordinasi dengan Subdit/ tim ahli IG terkait progres pengajuan permohonan					
						periode T22-B12 Pengajuan permohonan IG					
13	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic		Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic		periode T22-B02 - Kanwil mengikuti koordinasi konsep pelaksanaan IP Clinic atau Mobile IP Clinic oleh DJKI; - Penyusunan rencana target pelaksanaan IP Clinic/Mobile IP Clinic	100				B02.10.Laporan IP Clinic (1).pdf
						periode T22-B02					Revisi.10.B02.Laporn IP Clinic.pdf
						periode T22-B03 Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab - pelaksanaan IP Clinic atau MIC terkait persiapan sarana prasarana layanan HKI; - Edukasi/Sosialisasi/Diseminasi KI	100				10.B03.Laporan Koordinasi Mitra Wilayah Pelaksanaan MIC.pdf
						periode T22-B03					Revisi.10.B03.Laporan Koordinasi Mitra Wilayah Pelaksanaan MIC.pdf
						periode T22-B04 - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/ Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda)	100				10.B04.Laporan pelaksanaan IP Clinic atau MIC.pdf
						periode T22-B05 - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda)					10.B05.Laporan pelaksanaan IP Clinic atau MIC.pdf
						periode T22-B06 - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda)	100				10.B06.Laporan pelaksanaan IP Clinic atau MIC.pdf
						periode T22-B07 - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda)					
						periode T22-B08 - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda)					
						periode T22-B09					
						periode T22-B10					
14	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual		Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual		periode T22-B01 Menginventarisir pusat perbelanjaan dalam perencanaan sertifikasi pusat perbelanjaan/ stakeholder berbasis KI	100				11.B01.Sertifikasi Pusat Pembelanjaan.pdf
						periode T22-B02 Pelaksanaan koordinasi melalui penyusunan konsep sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dengan DJKI					11.B02 Sertifikasi pusat pembelanjaan.pdf
						periode T22-B02	100				11.B02.1.DAftar Sertifikasi pusat pembelanjaan.pdf
						periode T22-B03 - Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner					11.B03.Laporan Kegiatan Penyebaran Kuesioner sertifikasi.pdf



No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T22-B04 - Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	100				11.B04.Laporan Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja.pdf
						periode T22-B05					11.B05.Laporan kegiatan validasi penyebaran kuesioner kepada Pusat Perbelanjaan.pdf
						periode T22-B06	100				11.B06.Sertifikasi Pusat Pembelanjaan_Penyebaran kuesioner kepada staleholder.pdf
						periode T22-B07					
						periode T22-B08					
						periode T22-B09					
						periode T22-B10					
						periode T22-B11					
						periode T22-B12 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI dan rencana kerja 2023					